

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
SEKOLAH (APBS) TERHADAP PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH**  
(Studi Empiris pada Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Patrang  
Kabupaten Jember)

Oleh:

**Laksmi Mahendradi Dwiharja**  
**Taufik Kurrohman**  
(Universitas Jember)

**Abstract**

*Accountability and transparency are needed to create credibility and fulfill the principles of good governance. The availability of space for the school committee to get involved is a hallmark of accountability and transparency of educational entities. Lack of accountability and transparency in management of School Budget are factors that affects the participation of school committees on performing the functions and its role against education. The purpose of this study was to examine the effect of accountability and transparency in the management of APBS against participation of the school committee. The population of this research is the Primary School in Patrang, Jember's Sub District listed in UPT District of Patrang, Department of Education in 2013 year. The sampling method used was purposive sampling, as the school committee to perform its functions more than one year with an error rate of 5% was its basic. Data were collected by trough questionnaires targeted to the school committee involved Chairman, Secretary, Treasurer, and members of structural discretion in each school. The data prior to analysis have been tested for validity and reliability. Techniques of data analysis used multiple regression. Results of this study concludes that accountability and transparency APBS has positive influence significantly on the participation of school committees.*

**Keywords:** *accountability, transparency, APBS management, participation of school committee*

**Pendahuluan**

Sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat selama dekade terakhir dalam perencanaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan. Sektor pendidikan mendapat perhatian yang cukup serius karena pendidikan merupakan kunci semua bidang yang mendukung pembangunan hampir semua aspek. Sejalan dengan berkembangnya manajemen pendidikan, pengelolaan pendidikan lebih terarah dan terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan dan pengawasan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sudah banyak diterapkan di sektor publik untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Untuk memperkecil dan mempersempit peluang penyimpangan, merupakan kewajiban masyarakat untuk ikut andil dalam perencanaan dan pengawasan. Bukan hanya sebagai *controller*, namun juga



kontributor dalam penyelenggaraan pendidikan. Achmadi (2002) dalam Coryanata (2007) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi sangat berguna untuk memvalidasi asal dan tujuan suatu program, sehingga diharapkan Komite Sekolah beserta segenap orang tua murid dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan.

Dalam lingkup sekolah, menurut perspektif akuntansi setiap kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran sekolah terhadap Komite Sekolah dan Pemerintah. Standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan untuk menjamin akuntabilitas publik. Kewajiban pihak sekolah untuk memberikan kemudahan informasi terhadap pengguna jasa pendidikan harus dipenuhi untuk mewujudkan transparansi sehingga menimbulkan efek timbal balik antara pihak *internal* maupun *eksternal* sekolah, serta meningkatkan pengawasan terhadap mutu pendidikan. Apabila pihak sekolah terlalu besar mendominasi keputusan dengan kurang bijaksana, maka akan berdampak terhadap dukungan pihak yang berkepentingan.

Sekolah Dasar Negeri yang dalam operasional penyelenggaraan pendidikannya masih didanai oleh BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dalam beberapa kasus masih belum mampu membebaskan orang tua murid dari sumbangan lainnya. Kurangnya partisipasi Komite Sekolah juga berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana BOS dan BOP, sehingga pihak Komite Sekolah juga harus memberikan partisipasi aktif terkait fungsinya selain pengawasan yang dilakukan oleh Kemdikbud. Pungutan dari orang tua murid sah dan dibenarkan dalam Undang-undang, akan tetapi tetap diwajibkan transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya.

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Patrang terdiri atas 28 sekolah dengan perbedaan kualitas yang cukup signifikan dan tersebar merata. Sekitar 28,5% merupakan sekolah yang terletak di pusat kota, 28,5% berada di sekitar pusat kota sedangkan 43% berada sedikit jauh dari pusat kota. Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Patrang secara keseluruhan sudah memenuhi standar entitas pendidikan yang berkualitas baik dari pengelolaan sumberdaya maupun kegiatan pendidikan. Secara rutin Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jember melaporkan APBS ke Dinas Pendidikan dan mengoptimalkan fungsi dari komite sekolah dengan menerapkan *good governance*. Kecamatan Patrang mampu mewakili keseluruhan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember yang merepresentasikan generalisasi hasil penelitian.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Boy dan Siringoringo (2009) yang menyimpulkan bahwa sikap akuntabel dan transparan satuan pendidikan dalam pengelolaan APBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan. Selain itu penelitian Solihat dan Sugiharto (2009) juga menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid, dengan pengaruh akuntabilitas sedikit lebih kuat daripada transparansi.



Peneliti mengambil jumlah sampel yang lebih besar untuk memperluas generalisasi penelitian dan memilih partisipasi komite sekolah sebagai variabel dependen untuk menguji kembali hasil penelitian dengan komite sekolah murni merupakan responden penelitian. Adapun sebagian kecil dari anggota komite sekolah merupakan *staff* pendidik sekolah namun dalam masing-masing struktur organisasi komite sekolah rata-rata hanya sebesar 18%, dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi. Hal tersebut lumrah dilakukan dan bersifat kondisional, serta diizinkan selama tidak menyimpang dari tujuan dibentuknya komite sekolah dan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh positif akuntabilitas APBS terhadap partisipasi Komite Sekolah? Dan apakah terdapat pengaruh positif transparansi APBS terhadap partisipasi Komite Sekolah?

### **Kajian Pustaka**

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Indonesia, pemerintah selalu mencari solusi yang tepat, baik itu dari segi kurikulum, proses pembelajaran, sarana dan prasarana sampai dengan pembiayaan (Usni dan Nurjanah : 2012). Pentingnya pembiayaan sekolah juga dijelaskan oleh Mulyasa (2005) dalam M. Djupri (2012) bahwa keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Menurut Sardjito dan Muthaheer (2007) anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. APBS adalah dokumen yang harus dibuat oleh penyelenggara sekolah yaitu kepala sekolah, komite, dan tim di awal tahun pelajaran. APBS memuat serangkaian kalkulasi kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berdasarkan rencana atau program yang telah disusun. RAPBS menjadi dasar pengelolaan manajemen untuk menyelaraskan informasi kebutuhan dana, sumber dana, dan program-program yang akan dilaksanakan.

Organisasi sektor pendidikan dibentuk untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan kepada masyarakat. Selain itu, ada pula tujuan keuangan yang harus dicapai oleh institusi pendidikan yang bergantung kepada besarnya biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, menyangkut pengalokasian dan pengelolaan sumber daya. Pembiayaan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sektor pendidikan.

Akuntabilitas institusi pendidikan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kredibilitas pengelolaan yang dijalankan. Apabila elemen pertanggungjawaban ini tidak dapat dipenuhi, implikasinya sangat luas, yang bisa berupa ketidakpercayaan, ketidakpuasan atau bahkan buruknya citra institusi. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu (a) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum; (b) Akuntabilitas Proses; (c) Akuntabilitas Program; (d) Akuntabilitas Kebijakan.

Penelitian Boy dan Siringoringo (2009) serta Solihat dan Sugiharto (2009) menarik kesimpulan bahwa akuntabilitas dan transparansi APBS dalam satuan pendidikan yang dilakukan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh



positif dan signifikan terhadap partisipasi orang tua murid terhadap pembiayaan pendidikan, dengan akuntabilitas pengaruhnya lebih kuat dibandingkan transparansi. Sikap akuntabel yang dapat diindikasikan dengan keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian APBS mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi Komite Sekolah/orang tua murid dalam pembiayaan pendidikan.

Responden dalam penelitian Boy dan Siringoringo (2009) adalah pengelola maupun pengguna APBS baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan unsur orang tua murid diwakili oleh Komite Sekolah dari seluruh Sekolah Menengah Atas (SMAN) kota Depok. Responden diklasifikasikan menurut kedudukan, umur dan jenis kelamin, dengan porsi sekolah sebanyak 76% dan Komite Sekolah 24%. Sedangkan pada penelitian Solihat dan Sugiharto (2009), responden merupakan orang tua murid SMA Negeri 107 Jakarta yang diklasifikasikan dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pengeluaran. Sampel penelitiannya diambil dari seluruh tingkatan kelas sekolah yang dilakukan dengan metode *stratified sampling* agar mampu merepresentasikan keseluruhan partisipasi orang tua murid

Akuntabilitas sangat penting bagi lembaga atau organisasi yang dibiayai, atau mempunyai ketergantungan dengan publik (Solihat dan Sugiharto : 2009). Menurut Hult (2006) dalam Boy dan Siringoringo (2009), akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan, perbuatan, dan kealpaan seseorang kepada yang berkepentingan. Dana yang dikelola secara akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan Komite Sekolah dan orang tua murid disamping faktor-faktor lainnya seperti aturan perundang-undangan, kewajiban, dan rasa tanggung jawab. Akuntabilitas finansial APBS berfokus pada penyajian laporan yang akurat dan tepat waktu untuk memastikan dana yang digunakan telah digunakan sesuai dengan tujuan secara efektif dan efisien.

Kemauan pihak sekolah dalam memberikan pertanggungjawaban secara horizontal dalam bentuk kemudahan akses informasi kepada Komite Sekolah selaku perwakilan seluruh orang tua murid diharapkan mampu meningkatkan partisipasi Komite Sekolah untuk berkontribusi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sekolah. Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan penulis, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi Komite Sekolah.

Dalam penerapannya, akuntabilitas tidak bisa dipisahkan dengan transparansi sebagai bagian dari prinsip *Good Governance*. Infid (2002) dalam Boy dan Siringoringo (2009) menyatakan bahwa transparansi penting, paling tidak karena tiga alasan yaitu pertama, untuk menjamin bahwa pemerintah akan merencanakan program secara tepat; kedua untuk menjamin pemerintah tidak akan menipu publik dan ketiga untuk mendukung kebijakan pemerintah.

Salah satu indikator keberhasilan transparansi adalah meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah. Selain itu transparansi juga berdampak meningkatnya kepercayaan dan keyakinan Komite Sekolah bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah bersih dan bijaksana. Transparansi APBS mampu meningkatkan pengawasan Komite Sekolah terhadap pengalokasian sumber daya sekolah termasuk dana sumbangan sehingga kepercayaan Komite



Sekolah juga meningkat yang berimplikasi pada partisipasi Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah terkait fungsi dan peranannya yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan pemahaman dan pengetahuan penulis, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H<sub>2</sub> : Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi Komite Sekolah.

### Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti juga melakukan penelitian dengan metode survey dan menyebarkan kuesioner bagi responden Sekolah Dasar Negeri (SDN) Se-Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan survey lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah daftar pertanyaan (kuesioner) yang didistribusikan langsung (*self administrated questionnaires*) kepada responden. Peneliti menggunakan metode survey dan kuesioner yang berhubungan secara langsung dengan responden dan objek penelitian, yang diharapkan mampu merepresentasikan hasil penelitian dengan cukup akurat.

Populasi penelitian ini adalah Komite Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Patrang Jember. Berdasarkan *database* UPT Pendidikan Kecamatan Patrang, terdaftar 28 Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dengan keseluruhan sekolah rutin melaporkan APBS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Peneliti memilih sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* dari daftar Komite Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Patrang dengan kriteria sebagai berikut : (1) Komite sekolah dengan jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota; (2) Komite sekolah dengan masa jabatan minimal 1 tahun; (3) Komite sekolah aktif terlibat dalam RAPBS sekolah dan lain-lain terkait pendanaan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Adapun masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut: (a) Akuntabilitas APBS (X1) adalah bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap publik dengan melibatkan Komite Sekolah dan orang tua murid untuk mewujudkan *good governance* dalam instansi pendidikan. Menurut Boy dan Siringoringo (2009) akuntabilitas dalam pengelolaan APBS dengan demikian adalah kemauan pihak sekolah (pimpinan dan bendahara) dalam memberikan penjelasan dan justifikasi penerimaan dan penggunaan anggaran. Variabel ini diukur dengan 7 indikator yang diadaptasi dari Krina (2003) dan penelitian Boy dan Siringoringo (2009). Peneliti menyusun sendiri kuesioner dengan penyesuaian agar relevan terhadap objek penelitian. Variabel akuntabilitas diukur dengan indikator-indikator yang telah disebutkan menggunakan 5 skala Likert dalam kuesioner; (b) Transparansi APBS (X2) APBS didefinisikan sebagai pengungkapan penuh semua informasi keuangan sekolah yang relevan secara tepat waktu dan sistematis. Kombinasi transparansi anggaran dengan partisipasi Komite Sekolah dalam proses penganggaran berpotensi memerangi korupsi,



mendorong akuntabilitas publik dan mendorong instansi pemerintah untuk bijaksana mengelola dana masyarakat. Transparansi mampu meningkatkan kepercayaan atas dana yang disumbangkan sehingga meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari orang tua murid. Peneliti menyusun sendiri kuesioner yang diadaptasi dari indikator penelitian Boy dan Siringoringo (2009) serta Krina (2003). Variabel Transparansi diukur menggunakan 5 skala Likert dalam kuesioner.

Variabel dependen yang akan diteliti adalah partisipasi Komite Sekolah dalam APBS. Partisipasi Komite Sekolah adalah suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, terlibat dalam perencanaan, pengawasan, maupun emosional demi kemajuan penyelenggaraan pendidikan sekolah. Partisipasi Komite Sekolah diukur dengan kesediaan Komite Sekolah selaku perwakilan dari orang tua murid berkontribusi dalam proses dan kegiatan sekolah. Pengukuran pengaruh akuntabilitas dan transparansi APBS terhadap partisipasi Komite Sekolah dilakukan dengan beberapa indikator yang tertuang dalam kuesioner. Kuesioner penelitian dibuat sendiri oleh peneliti yang diadaptasi dari indikator dalam Krina (2003) dan penelitian Boy dan Siringoringo (2009). Variabel partisipasi Komite Sekolah diukur dengan menerapkan metode skala Likert.

Kejujuran dan kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner yang dibagikan sangat menentukan kualitas data yang akan diproses. Kesungguhan responden dapat dipengaruhi oleh situasi dan alat ukur yang digunakan, dan keabsahan hasil penelitian sangat ditentukan oleh instrumen pengukuran yang digunakan untuk menguji variabel penelitian. Alat ukur yang tidak valid akan mempengaruhi hasil penelitian yang tidak mampu merepresentasikan keadaan yang sebenarnya sebagai bentuk reliabilitas penelitian. Untuk menguji kualitas data dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas.

Validitas merujuk pada sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin kita ukur (Sekaran : 2006). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dari kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali : 2011). Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor pernyataan dengan skor total seluruh pernyataan. Teknik korelasi yang digunakan memakai hubungan antara hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian karena memakai skala Likert. Dalam penelitian ini, item dikatakan valid apabila koefisien korelasinya menunjukkan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 5\%$ ).

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten. Suatu pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas, mudah dipahami dan memiliki interpretasi yang sama meskipun disampaikan kepada responden yang berbeda dan waktu yang tidak sama. Menurut Imam Ghozali (2011) suatu kuesioner dapat dikatakan handal apabila jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian keandalan menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila



pengukuran dilakukan beberapa kali. Dalam penelitian ini, variabel dikatakan reliabel bila nilai *Croanbach Alpha* > 0,7.

Peneliti melakukan uji asumsi klasik agar memenuhi prinsip BLUE sebelum melakukan analisis data. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi.

Uji regresi digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai pengaruh variabel-variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen yang akan diuji dengan menggunakan teknik statistik yang menggunakan suatu model. Analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

- Y = Partisipasi Komite Sekolah
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Akuntabilitas APBS
- X<sub>2</sub> = Transparansi APBS
- e = Error

Adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu :

- Apabila signifikansi < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak
- Apabila signifikansi > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima

Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model persamaan regresi berganda mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji F merupakan uji kelayakan model, dimana jika hasil pengujian tidak signifikan, maka tidak disarankan untuk melakukan uji t. Kriteria pengujian F yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima

R<sup>2</sup> berfungsi untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Uji t menunjukkan seberapa jauh variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara individu, dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Pengukuran hipotesis dapat menggunakan suatu perbandingan antara t hitung dengan t tabel menggunakan kriteria sebagai berikut :

1. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $t < 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Hal itu menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependennya.
2. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>a</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya.

## Hasil dan Pembahasan

Masing-masing sekolah memiliki otonomi untuk memilih dan membentuk komite sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua murid maupun *staff* pendidik untuk menjadi bagian dari struktur



organisasi Komite Sekolah. Oleh karena itu jumlah komite secara keseluruhan pada tiap sekolah tidaklah sama. Adapun jumlah komite masing-masing sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berkisar antara 7-33 orang tiap sekolahnya.

Analisis responden dan informasi umum yang dilakukan pada 81 responden telah memenuhi kriteria yang kemudian ditabulasi untuk tujuan analisis data. Hasil dari pengolahan statistik deskriptif menunjukkan kecenderungan data yang diperoleh. Adapun variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden terhadap variabel-variabel penelitian yang kemudian dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata serta distribusi frekuensi pada variabel akuntabilitas pengelolaan APBS ( $X_1$ ), transparansi pengelolaan APBS ( $X_2$ ) dan partisipasi komite sekolah (Y). Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1, berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi
Akuntabilitas APBS	61	56	79	69,20	5,642
Transparansi APBS	61	42	58	49,84	3,583
Partisipasi Komite Sekolah	61	45	80	65,49	6,762

Sumber : data diolah

Akuntabilitas pengelolaan APBS diukur dari pertanggungjawaban baik tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap komite melalui rapat komite maupun informasi tak langsung. Akuntabilitas diukur dengan 16 pertanyaan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Variabel kedua dalam penelitian ini adalah transparansi pengelolaan APBS. Transparansi diukur dengan sejauh mana keterbukaan pihak sekolah menurut komite terhadap akses informasi APBS menggunakan 12 pertanyaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah partisipasi komite sekolah. Partisipasi komite sekolah diukur dengan peran aktif komite sekolah yang terlibat dalam aktivitas keterlibatan dan pengawasan finansial penyelenggaraan pendidikan sesuai fungsi dan wewenang komite. Variabel partisipasi komite sekolah diukur dengan 16 pertanyaan.

Dalam Uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas, ditemukan hasil bahwa setiap item pertanyaan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal dan dinyatakan valid serta kuesioner memiliki reliabilitas yang memadai.

Dalam Uji asumsi klasik, data telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik yaitu data residual berdistribusi normal, tidak ada gejala multikolinearitas yang terjadi pada variabel akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS karena nilai *tolerance*-nya diatas 0,10 dan VIF-nya dibawah 10. Selain itu juga tidak terjadi heteroskidastisitas pada model regresi. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS terhadap partisipasi komite sekolah.



Tujuan pengujian koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ) adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) sebesar 0,601 yang artinya 60,1% variasi partisipasi komite sekolah dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBS. Sedangkan sisanya yaitu 39,9% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini. Tabel 2 adalah tabel hasil dari perhitungan uji koefisien determinasi.

**Tabel 2**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	0,784	0,615	0,601		4,269

Sumber : Data primer diolah

Indikator signifikansi parameter koefisien *Adjusted R<sup>2</sup>* signifikan atau tidak maka dapat dilakukan pengujian dengan bantuan alat uji statistik metode Fisher (Uji F) dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 dengan nilai F hitung 46,273. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi komite sekolah diterima. Tabel 3 berikut ini adalah tabel hasil dari perhitungan uji F.

**Tabel 3**  
**Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Signifikansi
1	Regression	1686,374	2	843,187	46,273	0,000
	Residual	1056,872	58	18,222		
	Total	2743,246	60			

Sumber : Data primer diolah

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) terhadap partisipasi komite sekolah dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4 adalah sebagai berikut.



**Tabel 4**  
**Hasil Uji t**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig</i>	<i>Keterangan</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>			
(Constant)	-5,283	7,885		-0,670	0,506	
Akuntabilitas	0,754	0,141	0,629	5,342	0,000	Diterima
Transparansi	0,373	0,222	0,197	1,676	0,009	Diterima

Sumber : Data primer diolah

Hasil perhitungan statistik pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa dua variabel bebas secara signifikan mempengaruhi partisipasi komite sekolah, yaitu variabel akuntabilitas dan tansparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Kedua variabel independen menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000 untuk akuntabilitas, dan 0,009 untuk transparansi.

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil uji hipotesis dari penelitian ini tersaji pada tabel 5, sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Hipotesis**

No	Hipotesis	Hasil Uji
1	Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah	Diterima
2	Transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah	Diterima

Variabel akuntabilitas pengelolaan APBS memiliki koefisien regresi positif dan berpengaruh secara statistik signifikan terhadap partisipasi komite sekolah. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari yang telah ditentukan, yaitu dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05, sedangkan tingkat signifikansi variabel akuntabilitas pengelolaan APBS adalah sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis pertama diterima, yaitu akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah.

Variabel akuntabilitas menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,629. Semakin akuntabel pihak sekolah dalam pengelolaan APBS maka akan meningkatkan kepercayaan komite sekolah mengenai pengelolaan sumberdaya sekolah baik yang berasal dari BOS maupun sumbangan orangtua murid.

Meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bersih, juga berimplikasi mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif. Dengan melakukan



kewajiban pertanggungjawaban, maka pihak komite sekolah dapat turut serta membantu sekolah dalam peranannya untuk mencapai tujuan APBS. Pertanggungjawaban bukan hanya hak komite sekolah, namun juga segenap masyarakat terlebih wali murid. Dengan akuntabilitas yang tinggi, komite sekolah juga terlibat dan ikut bertanggungjawab terhadap mutu dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, sehingga termotivasi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi komite sekolah. Hal ini tercermin secara nyata bahwa akuntabilitas akan menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi bahkan mendorong keberlangsungan kinerja manajemen sekolah agar lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Boy dan Siringoringo (2009) serta Solihat dan Sugiharto (2009) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan finansial sekolah berpengaruh positif terhadap partisipasi orang tua murid. Kemauan yang tinggi dari pimpinan sekolah dalam memberikan pertanggungjawaban APBS dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid untuk ikut berperan dalam pembiayaan pendidikan, khususnya dana yang bersumber dari orang tua murid, harus dikelola secara akuntabel guna memberikan kepercayaan pada orang tua murid sehingga orang tua murid akan meningkatkan partisipasinya dalam pembiayaan pendidikan (Boy dan Siringoringo : 2009).

Dalam hasil statistik ditunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan APBS menunjukkan signifikansi 0,009 atau sebesar 1% yang lebih rendah dibandingkan ketentuan yaitu sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan APBS berpengaruh signifikan secara statistik terhadap partisipasi komite Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Variabel partisipasi pengelolaan APBS memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,197 yang menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan finansial sekolah maka dapat meningkatkan partisipasi komite sekolah tersebut.

Sikap transparan pihak sekolah dalam pengelolaan APBS sangat penting dikarenakan faktor yang dapat menumbuhkan kepercayaan timbal balik salah satunya adalah kemudahan informasi yang tepat dan akurat. Dalam sikap transparan juga terdapat aspek pengawasan untuk menjamin bahwa data finansial yang dilaporkan sesuai dengan realitas atau dikelola secara bijaksana. Kemudahan akses informasi dapat meningkatkan pengawasan komite sekolah yang sekaligus dapat meningkatkan partisipasi. Partisipasi komite sekolah dapat berupa saran, evaluasi, pengetahuan, koordinasi segenap wali murid dan lain-lain sesuai tugas dan fungsi komite sekolah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Boy dan Siringoringo (2009) serta Solihat dan Sugiharto (2009) yang menunjukkan bahwa ukuran transparansi pengelolaan APBS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi komite sekolah. Akan tetapi, pengaruh akuntabilitas lebih kuat dibandingkan pengaruh transparansi. Faktanya masyarakat dan komite sekolah lebih menuntut sikap akuntabel yang tercermin dari tanggungjawab pihak sekolah terhadap sumberdaya untuk pendidikan terutama yang berasal dari wali murid untuk dikelola secara tepat dan efisien sesuai tujuan pendidikan.



### Simpulan

Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji apakah variabel akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh terhadap partisipasi komite sekolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil uji hipotesis yang telah dibahas pada bab 4, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Patrang atau hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Boy dan Siringoringo (2009), serta Solihat dan Sugiharto (2009).
- b. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) berpengaruh positif terhadap partisipasi komite sekolah Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Patrang atau hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini konsisten terhadap penelitian Boy dan Siringoringo (2009), serta Solihat dan Sugiharto (2009).
- c. Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) lebih besar pengaruhnya terhadap partisipasi komite sekolah dibandingkan dengan sikap transparan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Boy dan Siringoringo (2009) serta Solihat dan Sugiharto (2009) bahwa sikap akuntabel pengaruhnya lebih signifikan dibandingkan sikap transparan terhadap partisipasi komite sekolah.

### Daftar Pustaka

- Ali Usni, N. 2012. *Opini Wali Murid Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Oleh Dinas Pendidikan Kab. Kampar Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMPN 3 Siak Hulu*. <http://repository.unri.ac.id>
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Boy, D., dan Siringoringo, H. 2009. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Terhadap Partisipasi Orang Tua Murid*. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 14 No. 12 : 79-87.
- Coryanata, I. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar : 3-8.
- Djupri, M. 2012. *Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI di SMPN 2 Rembang*. *Journal of Economic Education*. [Journal.unnes.ac.id](http://Journal.unnes.ac.id)
- Ghozali, I. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 5. Yogyakarta, Indonesia : BPFE UGM.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.



- Krina, L.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance. BAPPENAS. Jakarta.
- Munawar., Irianto, G., dan Nurkholis. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang : 4-5.
- Nasution, A. 2009. *Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Negara*. <http://www.bpk.go.id>.
- Ninik. 2011. *Peran Komite Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 1 Tuntang Kabupaten Semarang*. [journal.unnes.ac.id](http://journal.unnes.ac.id)
- Nordiawan., D. Putra., I.S. dan Rahmawati., M. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Solihat., E dan Sugiharto., T. 2009. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan Terhadap Partisipasi Orang tua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta*. Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 14 No.2 : 135-143
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi IV Surabaya : 1163
- Suhartono, E., dan Solichin, M. 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang : 2-3.
- Sutamto. 2010. *Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. <http://sutamto.wordpress.com>
- Sutedjo. 2009. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)*. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
- Yulianti, R.T. 2010. *Transparansi Anggaran : Suatu Upaya Efisiensi dan Antisipasi Anti Korupsi di Indonesia*. La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol 4 No. 2 : 241-245.